

RINGKASAN

TIARA PRATIWI
NIM 200510143

**Penegakan Hukum Terhadap
Tindak Pidana Pemerasan Dengan
Pengancaman Yang Dilakukan Oleh
Debt Collector (Studi Penelitian di
Polres Lhokseumawe)
(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H.
dan Dr. Malahayati, S.H., LL.M.)**

Tindak pidana pemerasan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sudah banyak terjadi, dari zaman dulu sampai sekarang. Pemerasan pada dasarnya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368. Subjek yang melakukan tindak pidana pemerasan ini sering kali dilakukan oleh *debt collector*. Istilah *debt collector* dalam dunia penagihan hutang memang bukan suatu hal yang baru.. Pelaksanaan eksekusi tidak boleh dilakukan langsung oleh kreditor maupun *debt collector* seenaknya sendiri namun harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dan hambatan serta solusi dalam penegakan hukum. Penelitian ini dilakukan di Polres Lhokseumawe. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang bagaimana penegakan hukum dan bagaimana hambatan serta solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector*.

Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, serta teknik analisis data yang digunakan secara kualitatif.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector* di Kota Lhokseumawe adalah terhadap dua pelaku sampai saat ini berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) yang artinya penegakan hukum tidak ditegakkan sebagaimana seharusnya. Hambatan dalam penegakan hukumnya adalah kurang berperannya penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurangnya sarana dan prasarana. Solusi dalam penegakan hukumnya adalah mengajak masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian jika menemukan atau melihat pelaku yang berstatus DPO tersebut untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian. Dan mengupayakan untuk meningkatkan kinerja Kepolisian guna menegakkan hukum terhadap dua pelaku lagi yang berstatus DPO.

Saran yang dapat diberikan kepada pihak kepolisian Resor Lhokseumawe adalah segera melakukan pengejaran dan penangkapan guna untuk menegakkan hukum terhadap pelaku. Dengan begitu rasa keadilan terhadap korban terpenuhi.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Pemerasan, Debt Collector*

SUMMARY

TIARA PRATIWI
NIM 2005101

***Law Enforcement Against The Crime
Of Extortion With Threats Permitted
By Debt Collectors (Research Study at
Lhokseumawe Police)***
**(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H.
and Dr. Malahayati, S.H., LL.M.)**

The crime of extortion can be said to be an act that has occurred many times, from ancient times until now. Subjects who commit this criminal act of extortion are often carried out by debt collectors. The term debt collector in the world of debt collection is not something new, although it is not known exactly when this profession started. The execution cannot be carried out directly by creditors or debt collectors at will, but must still follow the procedures for implementing a court decision.

This research aims to determine law enforcement and obstacles and solutions in law enforcement. This research was conducted at the Lhokseumawe Police. The focus of this research is to examine how the law is enforced and what are the obstacles and solutions in law enforcement against criminal acts of extortion with threats carried out by debt collectors.

This type of research is empirical juridical using a case approach method. The data sources used consist of primary data and secondary data. Data collection techniques consist of field research and library research, as well as qualitative data analysis techniques used.

Law enforcement regarding the criminal act of extortion with threats carried out by debt collectors in Lhokseumawe City is against two perpetrators who are currently on the Wanted List (DPO), which means that law enforcement is not being enforced as it should be. Barriers to law enforcement are the lack of role of law enforcers, low public legal awareness, and lack of facilities and infrastructure. The solution in law enforcement is to invite the public to cooperate with the police. If they find or see a perpetrator with DPO status, they must immediately report it to the police. And strive to improve the performance of the Police to enforce the law against two more perpetrators who have DPO status.

The advice that can be given to the Lhokseumawe Resort police is to immediately pursue and arrest in order to enforce the law against the perpetrator. In this way, a sense of justice towards the victim is fulfilled.

Keywords : Law Enforcement, Extortion, Debt Collector

